

Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial

Rifyal Zuhdi Gultom¹, Annisa Qadarusman Tini²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

*Email korespondensi: rifyalgultom@gmail.com

Abstract

As a process and effort to achieve the goals desired by a country is through economic development. One of the supporting facilities for economic development is infrastructure development. Infrastructure is a driver of economic development in a country that will have an impact on the sustainability of economic development in the region. The purpose of this study is to find out how Islam views the infrastructure development carried out by a country in economic and social review, and what kind of development is a priority. This research uses literature study methods related to infrastructure, and Islamic principles that must be met in development. The results showed that infrastructure development became an important part of economic development, but not absolutely. If a country has adequate infrastructure and is right on target, economic goals will be easily achieved, so that it will indirectly improve the social aspects of a country's society. In addition, infrastructure development must be in accordance with Islamic principles, because Islam also pays attention to the problem of economic development, but still places it on the larger development problem, namely human development. The main function of Islamic teachings is to guide humans in the right and right direction. All aspects related to economic development must be integrated with overall human development both economic and social aspects of concern.

Keywords: *Economic development, Islam, human, infrastructure, economy, and social*

Saran sitasi: Gultom, R. Z., & Tini, A. Q., (2020). Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 203-211. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.912>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.912>

1. PENDAHULUAN

Pembangunan dalam berbagai bidang adalah salah satu strategi untuk mencapai tujuan yang dicitakan oleh suatu negara. Maka salah satu yang menjadi perhatian penting adalah pembangunan

Dalam perkembangannya, para ahli memberikan pengertian atau batasan tentang ekonomi pembangunan berdasarkan latar belakang tersebut. Ekonomi pembangunan adalah suatu studi yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk berkembang, dengan

Berbagai perencanaan pembangunan selalu mengarah pada penguatan bidang ekonomi. Indikator keberhasilan pembangunan suatu negara dapat dilihat pada ketercapaian target-target ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita penduduk, jumlah pengangguran, tingkat kemiskinan, dan neraca pembayaran adalah ukuran-ukuran yang dicapai dalam menilai tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi (Baswir, 2008).

kemiskinan, pengangguran dan pemerataan. Maka salah satu penunjang untuk menyelesaikan masalah-masalah utama tersebut adalah pembangunan infrastruktur, baik secara fisik maupun non-fisik.

Pembangunan fisik merupakan perwujudan nyata dari suatu pembangunan yang meliputi sosial budaya, sosial ekonomi dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan pendapat Sujarto (1985) yang menyebutkan bahwa aspek pembangunan fisik merupakan perwujudan nyata suatu tuntutan

kebutuhan yang disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan kegiatan sosial serta budaya suatu masyarakat.

Maka pengertian pembangunan fisik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, dengan maksud untuk mengadakan kegiatan ke arah perubahan yang lebih baik dan perubahan tersebut dapat dilihat secara konkrit, nyata dari bentuk perubahannya. Dengan kata lain bahwa perubahan itu identik dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan seperti adanya gedung-gedung, sarana perumahan, sarana peribadatan, sarana jalan, sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya.

Salah satu bagian dari pembangunan adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan suatu negara. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi jika dilihat dari periode sekarang, yang mana indikatornya adalah seberapa baik kualitas infrastruktur suatu negara.

Laju pertumbuhan ekonomi dan investasi suatu negara atau wilayah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Inilah yang menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikan oleh pemerintah diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi (Sumadiasa, 2016).

Dalam perspektif Islam, aspek pembangunan tentu mempunyai karakteristik dan orientasi yang berbeda dengan pembangunan dalam ekonomi konvensional. Islam memandang bahwa tidak hanya pembangunan secara material saja yang penting, tetapi ada aspek spiritual dan aspek moral juga sangat penting. Karena pembangunan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada yang sifatnya duniawi, tetapi lebih dari itu, yaitu dunia dan akhirat.

Kemudian fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan budayanya. Ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi konvensional yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja. Dengan demikian Islam memperluas wilayah jangkauan obyek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia. Pembangunan adalah aktivitas multidimensional sehingga semua usaha harus

diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan. Penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam, terletak pada; pertama, pemanfaatan sumber daya yang telah diberikan Allah kepada umat manusia dan lingkungannya semaksimal dan sebaik mungkin. Kedua, pemanfaatan sumber daya tersebut melalui pembagian, peningkatannya secara merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran. Islam menganjurkan sikap syukur dan adil dan mengutuk sikap kufur dan zalim.

Secara umum tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam adalah terpenuhinya dan terpeliharanya *maqâshid syarīah* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), sehingga tercapai *falāh* atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Sebagaimana Muhammad Akram Khan (1994) menjelaskan bahwa *falāh* meliputi kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan harga diri dengan beberapa aspek yang dipenuhi baik dalam skala kecil maupun besar. Sesuai dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهَا وَإِلَيْهَا رُجُوعُكُمْ

Huwallazī ja'ala lakumul-arḍa ḍalūlan famsyū fī manākibihā wa kulū mir rizqih, wa ilaihin-nusyūr

Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

Ayat ini mengandung makna bahwa secara umum, bagaimana kewajiban mengeluarkan biaya dan membangun fasilitas yang mendukung keberhasilan tersebut. Sudah sangat jelas bahwa dalam Islam pembangunan juga menjadi perhatian penting dalam memajukan peradaban. Oleh karena itu, Allah SWT memberikan syariat atau undang-undang Islam yang ditujukan agar dapat membimbing manusia mencapai nilai kehidupan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Syariat Islam telah memastikan adanya kesesuaian di dalam kehidupan manusia, maka apabila peraturan Islam dilaksanakan berdasarkan panduan objektif-objektif syariah yang umum maupun khusus, maka pasti kestabilan dan keadilan sosial ekonomi akan tercapai.

Kembali ke sejarah Islam, ketika Rasulullah hijrah dari Makkah menuju Madinah. Hal yang pertama dilakukan adalah dengan membangun sebuah

masjid. Alasan Rasulullah terkait kebijakan tersebut adalah bahwa jika ingin membangun suatu peradaban yang berkemajuan, yang unggul dalam berbagai bidang baik agama, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Maka infrastruktur menjadi faktor yang penting. Maka tidak ada lagi keraguan bahwa Islam juga sangat memperhatikan aspek pembangunan baik fisik dan non-fisik.

Hal ini menjadi perhatian, bahwa pembangunan fisik dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting. Secara tidak langsung, ketika sebuah negara memiliki aspek infrastruktur yang baik maka akan mempengaruhi alur distribusi ekonomi. Jika baik, maka distribusi akan lancar sehingga aspek ekonomi dan sosial akan terpenuhi dengan baik. Namun jika infrastruktur tidak baik, maka akan menyebabkan alur distribusi akan menjadi terhambat. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur menjadi aspek yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja.

Tulisan ini membahas bagaimana pembangunan infrastruktur dalam perspektif Islam, lebih khusus dalam aspek ekonomi dan sosial. Di mana pembangunan infrastruktur menjadi penting, namun tetap melihat pada prioritas apa yang tepat dalam pembangunan tersebut, karena setiap daerah atau wilayah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Selain itu akan di utarakan bagaimana pembangunan manusia jauh lebih penting sebagai pondasi pembangunan dalam ekonomi Islam.

Makna Infrastruktur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik, contohnya rumah sakit, jalan, sanitasi, jembatan, halte, dsb. Menurut Ronald dalam *The Routledge Dictionary of Economics* (2002) memberikan pengertian bahwa infrastruktur adalah pelayanan utama negara yang dapat membantu kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat sehingga dapat berjalan dengan membangun sarana prasarana dan fasilitas pendukung lainnya. Sedangkan *Macmillan Dictionary of Modern Economics* mendefinisikan infrastruktur sebagai jembatan dan elemen struktural ekonomi yang memfasilitasi arus barang dan jasa antara pembeli dan penjual. Sebagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat, maka masyarakat dapat memakai infrastruktur untuk kegiatan ekonominya. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur dapat memajukan ekonomi sebuah negara.

Dalam hubungan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi, beberapa ekonom juga memberikan pendapatnya mengenai infrastruktur. Todaro (2006) menjelaskan kaitan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi bahwa tercakup dalam pengertian infrastruktur adalah aspek fisik dan finansial yang terkandung dalam jalan raya, kereta api, pelabuhan laut dan bentuk-bentuk sarana transportasi dan komunikasi ditambah air bersih, listrik dan pelayanan publik lainnya. Sedangkan penelitian Ramirez (1999) menunjukkan bahwa infrastruktur mempunyai dampak kuat terhadap pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara.

Dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwa pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha untuk melakukan pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan dalam suatu negara atau wilayah.

Merujuk pada publikasi *World Development Report*(1994) bahwa infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dimana pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi. Identifikasi terhadap program pembangunan infrastruktur di beberapa negara menyimpulkan bahwa pada umumnya program ditargetkan dalam jangka menengah dengan fokus pada peningkatan kebutuhan dasar dan konektivitas manusia, mulai dari air, listrik, energi, hingga transportasi (jalan raya, kereta api, pelabuhan dan bandara)(Maryaningsih. dkk, 2014).

Jenis dan Esensi dalam Infrastruktur

Dalam *World Development Report* (1994), Infrastruktur dibagi kedalam 3 golongan yaitu:

- a. Infrastruktur Ekonomi, aset fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi final maupun sarana publik (telekomunikasi, air minum, sanitasi, gas), *public works* (bendungan, saluran irigasi, dan drainase) serta transportasi (jalan, kereta api, angkutan pelabuhan, dan lain-lain)
- b. Infrastruktur Sosial, aset yang mendukung kesehatan dan keahlian masyarakat meliputi pendidikan (sekolah dan perpustakaan), kesehatan (rumah sakit, puskesmas), serta rekreasi (taman, museum).

- c. Infrastruktur Administrasi/institusi seperti penegakan hukum, administrasi kependudukan, kebudayaan dan lain-lain.

Infrastruktur secara umum meliputi fasilitas-fasilitas publik yang disiapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah sebagai pelayan publik (sebagai akibat mekanisme pasar tidak bekerja) untuk menunjang dan mendorong aktivitas ekonomi maupun sosial suatu masyarakat. Ciri-ciri utama dari barang publik adalah sisi penggunaannya (konsumsi barang publik) yaitu *non rivalry* dan *non excludable*. *Rivalry* adalah sifat rivalitas atau persaingan, hal ini berarti jika suatu barang digunakan oleh seorang pengguna, maka barang tersebut tidak dapat digunakan oleh pengguna lain. Ketika menggunakan barang tersebut tidak terjadi persaingan dengan orang lain dan tidak mempengaruhi kepuasan orang lain ketika menggunakannya, maka dapat disebut sebagai barang publik.

Excludable merupakan sifat mengeluarkan atau menghalangi seseorang alam mengkonsumsi atau menggunakan suatu barang. Artinya, keinginan seseorang (pengguna) dalam mengkonsumsi suatu barang dapat dihalangi oleh pihak lain (*supplier*). Jika konsumsi seseorang dibatasi dalam penggunaan suatu barang maka barang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai barang publik.

Dapat diketahui dari pendalaman sifat infrastruktur sebagai barang publik maka infrastruktur memiliki dampak eksternalitas positif. Definisi eksternalitas itu adalah kondisi dimana tindakan perusahaan atau individu memiliki dampak kepada individu atau perusahaan lainnya tanpa harus membayar dampak tersebut. Sesuai dengan sifatnya, infrastruktur dibangun oleh pemerintah dan pihak yang menggunakan infrastruktur tidak memberikan bayaran secara langsung atas penggunaan infrastruktur.

Infrastruktur yang disiapkan pun perlu disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Ada empat alasan pokok yang dapat dikemukakan tentang pentingnya pembangunan infrastruktur:

- a. Pembangunan infrastruktur mampu menyediakan lapangan pekerja. Hal ini merupakan salah satu nilai penting dan langkah ke arah terciptanya rakyat dan negara adil dan makmur.
- b. Pembangunan infrastruktur dasar, infrastruktur teknologi, dan infrastruktur sains secara

langsung akan mempengaruhi iklim investasi. Pertumbuhan kapital dan aliran investasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur pendukung baik pada zona kawasan industri, pelabuhan, pasar-pasar, dan perguruan tinggi yang dapat mendorong penemuan-penemuan baru di bidang sains dan dapat diterapkan oleh kalangan industri dan pelaku pasar.

- c. Infrastruktur akan sangat mempengaruhi bahkan menentukan integrasi sosial ekonomi rakyat satu daerah dengan daerah lainnya.
- d. Pembangunan infrastruktur akan membuka isolasi fisik dan non fisik di sejumlah wilayah. Dalam rangka politik integrasi bangsa di bidang sosial dan ekonomi, di mana tantangan bagi pemerintah ialah membangun infrastruktur yang dapat mengatasi isolasi fisik daerah di Indonesia awal abad 21 ini. Sebab isolasi fisik akan membawa dampak terhadap pembangunan sosial ekonomi pada wilayah-wilayah. Karena isolasi wilayah sehingga hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan sulit dipasarkan ke kota terdekat sehingga praktis hanya dikonsumsi anggota keluarga. Akibatnya, tingkat pendapatan tetap rendah, kemudian mereka di klaim sebagai masyarakat miskin.

Sehubungan dengan paparan tersebut di atas, maka peran pemerintah sangat diharapkan dapat melahirkan terobosan baru dalam politik infrastruktur. Beberapa di antaranya yaitu, pemerintah perlu mengkaji ulang dasar kebijakan infrastruktur selama ini yang lebih banyak dilaksanakan dengan indikator jumlah penduduk pada satu daerah serta nilai ekonomis dari proyek investasi tersebut. Hal ini sangat penting karena jika pertimbangan indikator-indikator tersebut sebagai rujukan dasar kebijakan pembangunan infrastruktur, maka daerah yang jumlah penduduknya kurang akan tetap tertinggal.

Dampak lain dari kebijakan dengan indikator ekonomi dan penduduk seperti itu adalah dapat menimbulkan arus urbanisasi besar-besaran ke kota yang dilengkapi fasilitas infrastruktur yang memadai dan murah. Kebijakan infrastruktur mestinya dapat dilakukan untuk mencegah urbanisasi atau pemusatan jaringan infrastruktur di kota-kota yang akan menarik terjadinya tingkat urbanisasi yang tinggi (Prapti, dkk, 2015).

Pembangunan Infrastruktur dalam Perspektif Sejarah Islam

Paradigma sebagai ruang lingkup berfikir dan aktivitas yang cukup signifikan dalam membedakan paradigma pembangunan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Menurut Mannan (1997) dalam pandangan ekonomi konvensional, semua diukur dengan pertumbuhan atau sebatas nilai (material) saja. Sedangkan konsep ekonomi pembangunan Islam mempunyai cakupan yang lebih luas. Pembangunan ekonomi Islam tidak hanya membangun pada aspek material saja, tetapi aspek spiritual dan moral juga sangat penting. Sehingga terintegrasi dengan pembangunan ekonomi. Berikut uraian mengenai pembangunan pada masa pemerintahan Islam:

a. Pembangunan di Masa Rasulullah

Sebelum masa-masa kenabian, Makkah merupakan sebuah tempat titik perhentian dalam aspek perdagangan antara jalur utara dan selatan sehingga membawa keuntungan ekonomi. Makkah menjadi tempat terjadinya kontak budaya dari berbagai suku. Untuk mempertahankan sistem ekonomi dalam potensi konflik yang mungkin terjadi antar suku, maka dibangun berbagai berhala mewakili semua suku.

Kelahiran Islam dengan Muhammad sebagai nabi, menghapuskan praktik hedonik di Makkah. Ka'bah lalu dibersihkan dari berhala-berhala sehingga memicu kemarahan masyarakat konservatif untuk hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, yang awalnya terbelakang dari sisi ekonomi kemudian menjadi kota yang makmur karena Muhammad menyatukan para suku yang sedang berkonflik.

Maka dibangunlah masjid-masjid untuk ibadah dan pendidikan, Muhammad segera membangun sejumlah peraturan terkait masalah-masalah ekonomi, dalam hal ini perdagangan berdasarkan prinsip kebebasan, keadilan, kejujuran, dan anti-monopoli (Malkawi, 2006).

b. Masa Khulafaur Rasyidin

1) Abu Bakar

Abu Bakar pada hari pertama terpilih, langsung berencana untuk meninjau pasar. Pencapaiannya dibidang ekonomi, yaitu pendirian Baitul Maal, sebuah lembaga keuangan publik yang menjadi pengendali ekonomi makro lewat struktur fiskal (Din, 2006). Perluasan wilayah Islam tetap terus berlanjut di masa ini. Setelah Umar terpilih menggantikan Abu Bakar, ia menyerukan kembali kepada *hadist* Nabi tentang bahwa siapa

pun yang menghidupkan tanah mati berhak memilikinya (Malkawi, 2006).

2) Umar bin Al-Khattab

Pada masa Umar, ia melanjutkan pembangunan Baitul Mal dengan melakukan sistematisasi proses fiskal. Dilakukan dengan cara mengelola sumber dan pengeluaran pendapatan. Tidak hanya bersumber dari zakat, sedekah, *ghanimah*, dan *jizyah* tetapi bea cukai, pajak pertambangan, pajak perdagangan, dll (Din, 2006).

3) Ustman bin Affan

Pada masa ini, uang tembaga diperkenalkan sebagai pecahan dari uang dirham (Din, 2006). Perilaku Ustman mirip dengan Umar dalam segi kesederhanaan. Banyak uangnya digunakan untuk membebaskan para budak (Tangali, 2010). Selain itu, dalam hal pembangunan. Ustman melakukan perluasan pada Masjidil Haram meskipun telah dilakukan pada masa pemerintahan Umar.

4) Ali bin Abi Thalib

Pada masa ini tidak ada pembangunan ekonomi secara besar-besaran karena meneruskan kebijakan-kebijakan umum dari pemerintahan sebelumnya. Sumber utama Ali dalam bidang ekonomi datang dari suratnya yang mana terdapat pada *Al-ashtar* dalam *Nahjul Balagha*. Sejumlah prinsip yang berhasil disarikan yaitu salah satunya adalah sumber daya publik tidak digunakan untuk tujuan pribadi.

c. Masa Dinasti Umayyah

Dalam masa dinasti ini, kerajaan Islam telah sangat luas dan pemerintah tidak hanya bertumpu pada sumber pendapatan lama negara. Pada masa Walid bin Abdul Malik, rumah ibadah, pusat pendidikan, infrastruktur, dan pertanian dibangun dan diperbaiki serta program jaminan sosial dibuat untuk melindungi orang-orang miskin dan meminta-minta (Din, 2006). Selain itu, banyak pula dibangun monumen-monumen besar (Hoyland, 2006).

d. Masa Dinasti Abbasiyah

Masa dinasti ini merupakan masa keemasan bagi ilmu pengetahuan di dunia Islam karena dalam masa ini terdapat gerakan penerjemah atas karya-karya ilmuwan Yunani, Syiria, India menjadi bahasa arab untuk dipelajari (Zulkifli, 2011). Kekhalifan ini dibatasi oleh tiga lapis tembok yang berada dipusat kota yaitu, Baghdad. Pembangunan tembok tersebut merupakan bentuk peradaban yang membedakan antara dunia luar dan dunia dalam.

Selain itu, di kota Baghdad juga terdapat sebuah rumah sakit umum gratis yang dibangun oleh negara untuk melayani masyarakat miskin (Sardar, 2003). Rumah sakit ini didanai oleh zakat sebagai bagian dari bentuk kewajiban negara dalam mendistribusikan kekayaan atau zakat yang dibayarkan oleh umat Muslim yang berkecukupan. Sistem rumah sakit umum gratis ini dipandang sebagai sistem pelayanan kesehatan nasional pertama di dunia. Adapun tokoh-tokoh pemikir Islam yang lahir pada masa ini adalah:

- Ibnu Hazm (994-1064)
- Al-Ghazali (1058-1111)
- Ibnu Khaldun (1332-1406)

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Studi literatur yaitu metode yang mencari referensi yang relevan dengan permasalahan yang ditemukan. Studi kepustakaan menggambarkan analisis teoritis, kajian ilmiah, rujukan serta literatur yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat setempat, norma dan nilai yang terbangun pada kondisi lapangan yang diamati (Sugiyono, 2016). Adapun data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber dari literatur atau referensi yang ada, seperti yang termuat dalam jurnal dan makalah ilmiah, ensiklopedia, literatur, serta sumber data lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Ekonomi dan Sosial

Infrastruktur dapat dibedakan dalam dua jenis, yakni infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Infrastruktur ekonomi merupakan jenis infrastruktur yang secara langsung mendorong kegiatan ekonomi masyarakat berupa infrastruktur fisik, yang digunakan dalam proses produksi dan distribusi serta yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Infrastruktur ekonomi meliputi semua prasarana umum, berupa tenaga listrik, telekomunikasi, perhubungan, irigasi, air bersih, dan sanitasi, serta pembuangan limbah. Adapun infrastruktur sosial adalah jenis infrastruktur yang mendukung kesejahteraan sosial, meliputi prasarana kesehatan dan pendidikan dan lain-lain.

Baik infrastruktur ekonomi maupun infrastruktur sosial merupakan bagian yang penting untuk diwujudkan dalam satu daerah atau wilayah. Daerah dengan kelengkapan sistem infrastruktur yang baik cenderung memiliki tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang juga lebih baik. Ini berarti bahwa penyediaan infrastruktur ini merupakan faktor penting dalam mendukung pembangunan suatu negara.

Sadr (2015) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa dalam masa awal periode Islam. Saat Rasulullah hijrah ke Madinah, dengan segala kesulitannya ketika itu. Ada kebijakan strategis yang diambil. Model pengembangan ekonomi dari periode paling awal Islam telah diselidiki dari empat dimensi:

- 1) Motif yang disediakan adalah untuk kegiatan ekonomi;
- 2) Terdapat lembaga yang memfasilitasi pertukaran;
- 3) Aturan perilaku yang ditentukan untuk tujuan membimbing kegiatan ekonomi sementara membatasi distorsi dan konflik kepentingan dalam kegiatan ini juga tindakan yang menyebabkan kerugian bagi publik; dan
- 4) Kebijakan yang diterapkan untuk mencapai tujuan Islam dan nilai keadilan.

Berdasarkan dimensi ini, menunjukkan bahwa itu adalah aktualisasi dari kemampuan yang melekat dari umat Islam yang merupakan kebijakan pusat yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Meningkatnya modal manusia umat Islam menyebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, keunggulan komparatif Semenanjung Arab untuk kegiatan, seperti perdagangan, dimanfaatkan untuk menciptakan peluang pertumbuhan. Selain itu, dan meskipun ada kendala yang sangat besar, seperti kekeringan di daerah itu, kegiatan pertanian mendapat prioritas. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari Kekaisaran Bizantium dan Persia memungkinkan pertumbuhan dan endogenisasi sains dan teknologi dengan adopsi lembaga yang sesuai untuk proses ini.

Dalam model pembangunan Islam, konseptualisasi masyarakat miskin atau kaya diberi makna baru. Kelangkaan tanah yang subur, lokasi geografis yang tidak membantu dan tidak tersedianya tambang dan sumber daya alam lain, tidak berarti bahwa individu dan ekonomi mereka rendah. Dalam masyarakat, di mana kemampuan bawaan individu terwujud melalui pendidikan dan pelatihan, di mana

visi dan proses berpikir individu berkembang dan berbagai keterampilan ilmiah dan teknologi berkembang bersama dan ekonomi yang berkembang dengan baik pula. Anggota masyarakat semacam itu melakukan kompensasi kelangkaan melalui penggunaan pengetahuan, keterampilan, dan kecerdikan mereka serta mengembangkan ekonomi mereka.

Tujuan murni dari Islam adalah kemajuan umat manusia (sumber daya manusia). Untuk ekonomi, ini diterjemahkan menjadi fokus pada bimbingan dan pertumbuhan modal manusia. Islam menargetkan peran manusia sebagai individu, keluarga dan masyarakat, dan melalui pembagian kerja sosial, keadilan yang berlaku di masyarakat. Ini diwujudkan melalui menetapkan tugas dan tanggung jawab untuk individu, keluarga dan masyarakat, di satu sisi penentuan adil adalah penghargaan ketika mereka melakukan tugas mereka. Atas dasar ini, hak ekonomi dan sosial didefinisikan. Selain itu, hak-hak ini diklarifikasi dan dijelaskan melalui pembentukan undang-undang, peraturan, dan lembaga yang sesuai. Berdasarkan model pengembangan periode Islam paling awal. Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menilai kebijakan ekonomi dan kemajuan menuju pembentukan masyarakat Muslim yang ideal. Mereka juga dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan berbagai kebijakan ekonomi.

Menurut Joni Tamkin Borhan (2008) mengungkapkan tentang tujuan kebijakan pembangunan dalam kerangka Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan sumber daya insani, yaitu menjadikan manusia sebagai objek utama dari kebijakan pembangunan Islam. Fokus utama dilakukan pada pengembangan pendidikan, orientasi spiritual dan pengembangan struktur hubungan yang berbasiskan kepada kerjasama, perkongsian dan penyertaan.
- 2) Pertambahan pengeluaran yang bermanfaat, dalam hal ini diutamakan pada pengeluaran yang mengutamakan keperluan dasar (*dharûriyât*) dibandingkan dengan pengeluaran atas barang pelengkap (*kamâliyât*) dan barang mewah (*tahsiniyât*).
- 3) Peningkatan kualitas kehidupan, yaitu melalui penciptaan lapangan kerja, pengadaan sistem jaminan sosial, dan pemerataan pendapatan.
- 4)

- 5) Pembangunan yang seimbang, yaitu pembangunan yang harmoni, tidak terjadi kepincangan pembangunan di berbagai sektor dan wilayah.
- 6) Pembangunan teknologi baru.
- 7) Pengurangan ketergantungan terhadap utang luar negeri.

Berdasarkan pendapat Joni Tamkin Borhan, di atas dapat dinyatakan bahwa pembangunan yang menjadikan pertambahan dalam perkembangan ekonomi di suatu wilayah atau daerah memiliki beberapa kebijakan terutama kebijakan yang bersumber dari sumber daya insani atau manusia itu sendiri sebagai objek utama dari kebijakan pembangunan. Sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik karena sumber daya manusianya telah memiliki *Islamic Worldview* yang kuat, sehingga setiap kebijakan yang diambil dalam hal ini ekonomi dan sosial, berlandaskan nilai-nilai Islam.

Untuk meningkatkan kualitas keseimbangan dalam pembangunan ekonomi yang berdampak terhadap ekonomi dan sosial, tentunya butuh adanya sebuah keseimbangan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dari segi ketepatan pembangunan. Kemudian tidak terjadi ketidakmerataan pembangunan di berbagai sektor dan wilayah, terutama kebijakan pembangunannya sendiri harus tegas dan sesuai dengan keadaan pembangunan yang dibutuhkan. Karena jika terjadi ketidaktegasan dalam pembangunan akan terjadi ketidakseimbangan pembangunan maka pembangunan yang terjadi tidak terintegrasi sehingga akan membuat kegagalan pembangunan dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, apalagi di sini sumber daya insani atau manusia ini sebagai objek utama pembangunan yang memiliki amanat untuk mengendalikan pembangunan itu sendiri.

Dalam Islam, Umer Chapra (2000) mengungkapkan bahwa masyarakat sekulerisme lebih mengedepankan aspek harta benda (material) dengan tidak melihat pada aspek moral, maka pembangunan material tidak akan mencapai sebuah keadilan tanpa mendapat dukungan dari moral itu sendiri. Hal itu karena pembangunan yang adil memerlukan penggunaan semua sumber dengan cara yang efektif dan efisien. Sehingga kedua-duanya mustahil dapat tercapai melainkan dibarengi dengan moral dan akhlak dalam seluruh kegiatan ekonomi. Hal itu karena, aktivitas ekonomi manusia tidak hanya

ditujukan sebagai pemuasan keperluan fisik saja, akan tetapi manusia juga memiliki tanggung jawab kepada Sang Pencipta. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat (*falah*) tidak dapat tercapai, kecuali jika ajaran Islam dilaksanakan secara menyeluruh atau *kaffah*. Sehingga pembangunan ekonomi harus dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, kebaikan yang seimbang dan kekal, kebaikan yang selaras dengan kaidah-kaidah agama Islam, sehingga kekayaan tidak berhenti pada satu individu atau satu komunitas saja.

Sehingga dengan adanya sebuah kebijakan yang dilakukan pemerintah selaku pemegang amanat yang telah diberikan oleh masyarakat kepadanya dapat menyeimbangkan dalam mengambil kebijakan mengenai rancangan dalam pembangunan ekonomi, karena pembangunan ekonomi ini harus bisa menciptakan keseimbangan antara individu dan kepentingan masyarakat, apalagi pembangunan ekonomi ini sangat berdampak positif terhadap perekonomian suatu wilayah. Dari pembangunan ekonomi ini juga dapat dilihat, apakah perekonomian di wilayah tersebut mengalami kenaikan atau penurunan setiap tahunnya. Selain itu, aspek sosial yang ditimbulkan harus terasa dampaknya di masyarakat, dengan tersedianya fasilitas-fasilitas yang memadai dan sesuai kebutuhan. Karena pada akhirnya, masyarakat juga sangat membutuhkan infrastruktur sosial, sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. KESIMPULAN

Ekonomi Pembangunan Islam pada hakikatnya merupakan upaya untuk memformulasikan suatu ilmu ekonomi yang berorientasi kepada manusia dan masyarakat yang tidak mengakui individualisme yang berlebihan, juga tidak membenarkan kolektifitas yang melanggar hak-hak perorangan, dengan berdasarkan kepada nilai-nilai Islâm, yaitu *Al-Qur'ân* dan *Al-Sunnah*.

Tujuan ekonomi Islam seirama dengan tujuan pokok Islam, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi semua umat manusia (*falah*). Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik dan kedamaian mental yaitu kebahagiaan, yang hal ini dapat diperoleh melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas individu. Pemenuhan kebutuhan rohani membutuhkan pembangunan moral, dan pemenuhan kebutuhan materi dapat direalisasikan dengan pembangunan umat manusia

dan sumber daya yang ada dalam suatu pola yang menyatu sehingga semua kebutuhan manusia, dapat dipenuhi secara utuh dan terwujud suatu distribusi kekayaan yang adil dan merata.

Dalam pembangunan ekonomi Islam menghendaki adanya kemakmuran dan kesejahteraan untuk setiap penduduknya tanpa melihat status sosialnya, apalagi manusia sebagai pengemban amanah di bumi ini sebagai pengendali (*khalifah*) untuk kemakmuran manusia dan alam sekitarnya. Sehingga apa yang menjadi tujuan awal dapat tercapai dengan sebaik-baiknya dengan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Maka pembangunan infrastruktur yang menjadi bagian penting juga tidak luput dari perhatian. Jika suatu negara memiliki infrastruktur yang memadai dan tepat sasaran maka tujuan ekonomi akan mudah tercapai. Selain itu, aspek sosial juga terkena dampak sehingga secara tidak langsung juga akan meningkatkan sisi sosial masyarakat suatu negara tersebut. Tentu tidak kalah pentingnya adalah bahwa pembangunan infrastruktur tersebut hendaknya untuk kepentingan seluruh elemen masyarakat, bukan atas dasar kepentingan kepentingan-kepentingan individu tertentu.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, terima kasih kepada kolega yang berkenan memberikan bantuan untuk menyelesaikan tulisan ini secara maksimal.

6. REFERENSI

- Abdullah, Mohammad, 2018, Waqf, Sustainable Development Goals (Sdgs) and Maqasid Al-Shariah, International Journal of Social Economics, Vol 45 Issue 1, hal 158-172.
- Aedy, Hasan, 2011, Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Beik, Irfan Syauqi dan Arsyianti, Laily Dwi, 2016, Ekonomi Pembangunan Syariah, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Borhan, Joni Tamkin Bin, 2008, Pemikiran Pembangunan Ekonomi Berteraskan Islam, Jurnal Ushuluddin, Vol 27, hal 93-107.
- Canning, David, 1999, Infrastructure's contribution to Aggregate Output, World Bank Policy Research working paper No 22-46.

- Chapra, Umer, 2000, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri. Jakarta:Gema Insani Press.
- Chapra, Umer, 2000, *Masa depan Ekonomi Islam: Sebuah Tinjauan Islam*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institute.
- Din, S, 2006, *Trading Halal Commodities: Opportunities and Challenges for the Muslim World*, Siri Syarahan Perdana Profesor, Universiti Teknologi Malaysia.
- Hassan, Abul, 2016, *Islamic ethical responsibilities for business and sustainable development*, Humanomics, Vol 32 Issue 1, hal 80-94.
- Hoyland, R, 2006, *Epigraphy. Encyclopedia of the Qur'an. Volume Two E-I. J.D. McAuliffe*, Leiden: Brill.
- Huda, Nurul dkk, 2015, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Macmillan Dictionary of Modern Economics.
- Palgrave Macmillan; 4th Revised edition edition.
- Malkawi, B, 2006, *Jordan and the World Trading System: A Case Study for Arab Countries*. PhD Dissertation, The American University.
- Mannan, Abdul A, 1997, *Islamic Economics, Theory and Practice*, diterjemahkan oleh M. Nastangin, Teori dan Praktik Ekonomi, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Maryaningsih, Novi, dkk, 2014. *Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol 17, No 1.
- Peerzade, S. A, 2014, *A Note on Economic Ideas of Imam Ali (A.S) with Special Reference to his Letter to Malik al-Ashtar*.
- Prapti N.S.S, Lulus, dkk, 2015. *Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang*, Jurnal Dinamika Sosbud, Vol 17, No 2.
- Ramirez, 1999, *Infrastructure, and Economics Growth*, Journal of Development Economic, Vol 70, hal 443-477.
- Rarasati, Dita. Dkk, 2014, *The opportunity for implementing Islamic project financing to the Indonesian infrastructure development*, Book series: Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis Vol 95.
- Rutherford, Donald, 2002, *Routledge Dictionary of Economics*, New York: Routledge.
- Sardar. 2003, *Islam, Postmodernism, and Other Futures*, Ed: S. Inayatullah dan G. Boxwell, London: Pluto Press.
- Seyed Kazem Sadr, 2015, *The role of human capital in economic development of the earliest Islamic period*, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol 8 Issue 4, hal 398-417.
- Sujarto. 1985. *Beberapa Pengertian Perencanaan Fisik*. Bharatara Karya aksara, Jakarta.
- Sumadiasa.(2016). *Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan, Listrik dan PMA terhadap Pertumbuhan PDRB BALI tahun 1993-2004*. E-Jurnal E.P Unud, Vol.5, No.7 : 925-947
- Tangali, 2010, *Serving His Creation: Understanding the Connection between Creator and Creation*, Master Thesis. Hijaz Collage Islamic University.
- Todaro, M.P dan Smith, S.C, 2006, *Pembangunan Ekonomi* diterjemahkan oleh Haris Munandar, Puji A.L, Jakarta: Erlangga.
- Yanuar, R, 2006, *Kaitan Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Output serta Dampaknya terhadap Kesenjangan di Indonesia*, Bogor: Tesis pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Zulkifli, M.Y Danesghar, 2011, *Islam and the Relation of Science and the Qur'an*, Internasional Conference on Humanities, Society, and Culture, Vol 20, hal 53-57.